



Kuasa Eksklusi dalam Pembangunan Geothermal di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

Andriana Natalia Wea¹, Laurensius P.Sayrani², Yonatan H.L Lopo³

¹ Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

² Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

³ Dosen Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Korespondensi Penulis : lianwea1@gmail.com

Abstract The research with the title *Power Of Exclusion in Geothermal Development in Ulubelu Vilage, Golewa District, Ngada Regerency* is motivated by the development of the Mataloko Georhermal Power Plant (PLTPB) with a formulation of How the power of exclusion is Particed Regarding Regulation, coercion, markets and legitimacy in the dimensions of power John Gaventa with the aim of exsplaning the practice of exclusionary power, in order to differentiate this proposal, the researcher used Tania Muray Lii research theory of exclusionary power by elaborating on John Gaventa three dimensional theory of power. The research method used in writing this proposal is descriptive qualitative. The research method used in this research is in the form of excluded local communities in the case limiting community access to land and natural. Resources project regulations energy as a central government initiative and regional government support and coercive power as an exclusionary strategy as well as the market as a vehicle for exclusion and supported by legitimasi which is used as a mode of geothermal development. Resources project regulations energy as a central government initiative and regional government support and coercive power as an axclusionary strategy as well as the market as a vehicle for exclusion and supported by legitiasi which is used as a mode of the geothermal development. The complexcity of the power dynamics the occur and the interactions between various kinds of intersests in the power dynamics the occur in the context of geothermal development. The analysis uses lii (2011) social exclusion theory framework and John Gaventa (2006) 3 dimensional theory of power to provide an In depth understanding of exclusion that exixts in society. Not a few people have lost access to land and land and to agricultural land as well as the implementation of authotharian regulations without considering the local context. This research shows that even though geothermal energy is clean, the development procces can create or worsen social injustice if it is not managed well. The implicatins of these findings are the need for WKP policy reform that takes into account the right of indigenous peoples, fair compensation mechanisms and transparent decision making processes that involve the entire community as well as aducational programs to increase public understanding of community rights.

Keywords: *Geothermal, Power Of Exclusion, National Strategy Development, 3 Dimensions Of Power, Ecological Destruction*

Abstrak Penelitian ini dengan judul " Kuasa Eksklusi Dalam Pembangunan Geothermal Di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada". Dilatarbelakangi oleh pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Mataloko, dengan rumusan Bagaimana Praktik Kuasa Eksklusi Mengenai Regulasi, Pemaksaan, Pasar Serta Legitimasi Dalam Tiga Dimensi Kuasa John Gaventa dengan Tujuan untuk Menjelaskan Praktik Kuasa Eksklusi. Guna membeda Proposal ini, peneliti menggunakan Teori Kuasa Eksklusi Tania muray Lii. penelitian dengan mengelaborasi dalam Teori Tiga Dimensi Kuasa John Gaventa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. bahwa pembangunan geothermal telah mengeksklusi masarakat lokal dalam hal ini pembatasan akses terhadap masyarakat dari tanah. Sumber daya alam. Regulasi proyekn energy sebagai inisiatif pemerintah pusat dan dukungan pemerintah daerah, dan kuasa koersi sebagai siasat eksklusi, juga pasar sebagai wahana eksklusi dan didukung oleh legiitmasi yang digunakan sebagai modus pembangunan geothermal. Komplektivitas dinamika kekuasaan yang terjadi serta interaksi antara berbagai macam kepentingan dalam dinamika kekuasaan yang terjadi dalam konteks pembangunan geothermal. Analisis menggunakan kerangka teori eksklusi sosial LI (2011) dan teori 3 dimensi kuasa John Gaventa (2006) memberikan pemahaman mendalam mengenai eksklusi yang ada dalam masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan akses atas tanah dan lahan dan ke lahan pertanian serta penetapan pemberlakuan pengaturan yang otoriter tanpa memikirkan konteks lokal. Penelitan ini menunjukkan bahwa meskipun geothermal energy bersih proses pengembangan dapat menciptakan atau memperparah ketidakadilan sosial jika tidak dikelola dengan baik. implikasi temuan ini yakni perlunya reformasi kebijakan WKP yang mempertimbangkan hak hak masyakat adat, mekanisme kompensas yang adil dan tranparan, proses pengambilan

keputusan yang melibatkan seluruh masyarakat serta program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak hak masyarakat.

Kata kunci : Geothermal, Kuasa Eksklusi,Pembangunan Strategy Nasional, 3 Dimensi Kuasa,Kehancuran Ekologi

1. PENDAHULUAN

Studi ini menjelaskan tentang persoalan pembangunan geothermal di Mataloko, Ngada yang mana telah memberi dampak yang tidak cukup baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat di Mataloko Ngada yang menyebabkan eksklusi sosial. Perlu diketahui bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ini sudah dirancang sejak tahun 1998, namun baru dimulai tahun 2002, Pengeboran pertama kali dilakukan lewat tiga titik di atas tanah seluas lima hektare, namun pengeboran tersebut mengalami kebocoran hingga mengakibatkan semburan lumpur dan gas panas. Akibat semburan lumpur dan semburan gas tersebut banyak lahan sawah, kebun, dan rumah warga rusak akibat proyek PLTP Mataloko tersebut, Kemudian kerusakan juga terjadi disalah satu sungai yang biasanya digunakan oleh warga sebagai sumber air harus tercemar oleh lumpur, ditambah lagi kualitas udara yang berubah menjadi sangat kotor. Oleh sebab itu terdapat 1.579 rumah rusak dan 11 desa terdampak dari pembangunan PLTP Mataloko tersebut. Awalnya proyek PLTP Mataloko ini ditargetkan selesai pada tahun 2019 namun malah gagal dan menghasilkan paket blerang, Prabowo(dalam, Ulul Wildan, 2023;1)

Persoalan krisis energi dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi hingga pengembangan energi baru terbarukan di berbagai pelosok negeri, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Pada tahun 2017. Hal ini bermula dari Kementrian Energi dan dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah meluncurkan program Flores Geothermal Island. Penetapan Flores Sebagai pulau Panas Bumi tertuang dalam keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Hal tersebut diatas juga didukung dengan disusunnya peta jalan (Road Map) Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Keputusan ini dilatarbelakangi dengan melihat potensi panas bumi di Pulau Flores yang tersebar di Enam Belas (16) titik, mulai dari Wae Sano, Ulumbu, WaePesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atadei, Bukapiting, Roma-Ujelewung, dan OyangBarang. Salah satu wilayah dengan potensi energi panas bumi yang tinggi adalah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko, Kabupaten Ngada, yang memiliki Potensi sebesar 20 MW

Kehadiran proyek geothermal menciptakan paling tidak empat problem serius di kuasa eksklusi dianggap lebih baik dalam masalah pembangunan geothermal karena memberikan hak eksklusif kepada pihak yang dapat mengelola sumber daya tersebut. Dengan memberikan hak eksklusif, pengelolaan geothermal dapat lebih terfokus, mencegah tumpang tindih kegiatan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat menciptakan insentif bagi pemegang hak eksklusif untuk menginvestasikan sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi geothermal secara berkelanjutan. Kuasa eksklusi juga dapat membantu mengatasi potensi konflik kepentingan di antara berbagai pihak yang tertarik dalam pengembangan geothermal Ngada, yang menjadi locus penelitian Penulis.

Penulis tertarik mengkaji masalah ini dengan menggunakan teori kuasa eksklusi karena kajian kuasa eksklusi bermanfaat dalam menganalisis masalah pembangunan geothermal yang mempertimbangkan pemberian hak eksklusif kepada pihak yang memiliki sumber daya tersebut. Ini dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan geothermal, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan keberlanjutan serta efisiensi dalam pemanfaatan energi geothermal. Kuasa eksklusi dianggap lebih baik dalam masalah pembangunan geothermal karena memberikan hak eksklusif kepada pihak yang dapat mengelola sumber daya tersebut. Dengan memberikan hak eksklusif, pengelolaan geothermal dapat lebih terfokus, mencegah tumpang tindih kegiatan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat menciptakan insentif bagi pemegang hak eksklusif untuk menginvestasikan sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi geothermal secara berkelanjutan. Kuasa eksklusi juga dapat membantu mengatasi potensi konflik kepentingan di antara berbagai pihak yang tertarik dalam pengembangan geothermal. Toni Anu dalam(latumopi.com)

Problematika dialami oleh masyarakat Desa Mataloko yang mengakibatkan relasi sosial diantara warga di Mataloko mengalami perubahan yang relatif signifikan. Sikap saling curiga, rasa tidak percaya tuduh-menuduh, dan pertengkaran menjadi potret yang lazim dijumpai. Dengan demikian, kehadiran proyek geothermal telah memicu konflik dan pembelahan sosial yang akut diantara masyarakat dan antara masyarakat dengan negara. Berpijak pada beberapa problem krusial yang muncul dari eksplorasi Geothermal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tajuk “Kuasa Eksklusi Dalam Pembangunan Geothermal Di Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti tentang kuasa eksklusi dalam pembangunan geothermal di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan eksklusi yang terjadi (Pradoko 2017). Fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah masalah inti yang diperoleh pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Adalah diantaranya *Pertama*, Praktik kuasa eksklusi mengenai Regulasi yang meliputi; Regulasi dan kebijakan terkait pembangunan baik ditingkat nasional maupun lokal, sifat dari regulasi yang memfasilitasi atau justru mengekskluski kelompok tertentu dalam masyarakat, diskriminasi dalam pemberian izin, akses lahan, atau prasyarat lain yang menyebabkan eksklusi

Kedua, Praktik kuasa eksklusi mengenai Pemaksaan yang meliputi; penggunaan kekuatan atau ancaman dalam proses pembangunan geothermal, kelompok masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau intimidasi, pelanggaran hak asasi manusia seperti perampasan hak atas tanah atau sumber daya alam yang dimiliki masyarakat local serta Sanksi yang ditimpahkan kepada mereka yang melanggar hukum serta institusi yang melakukan praktik koersif kepada masyarakat.

Ketiga, Praktik kuasa eksklusi melalui pasar yang meliputi; pembatasan akses ke tanah melalui harga serta pemberian insentif yang mendukung klaim individu atau kelompok atas tanah secara eksklusif, mekanisme pasar seperti investasi dan peluang ekonomi.

Keempat, Praktik kuasa eksklusi melalui legitimasi yang meliputi; Landasan normatif terkait apa yang benar dan apa yang layak dalam mempertahankan akses atau mencegah akses. Evaluasi proses konsultasi dan pelibatan masyarakat, identifikasi suara dan kelompok tertentu didengar atau tidak dipertimbangkan, pelanggaran hak asasi manusia seperti perampasan hak atas tanah atau sumber daya alam yang dimiliki masyarakat lokal.

Dalam tiga dimensi kekuasaan John Gaventa (dimensi satu, dimensi dua serta dimensi tiga)

Sumber data yang didapatkan berasal dari beberapa informan kunci yang terdiri dari mantan Bupati Ngada, wakil Bupati Ngada kepala PLTP, kepala dinas lingkungan hidup, kepala Desa Ulubelu, tokoh agama dan tokoh masyarakat koordinator komunitas warga tolak geothermal. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik melalui dokumen dan secara lisan melalui wawancara sumberdata tersebut meliputi data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, (Koentjaraningrat; 1990).

Adapun teknik analisis data yang mana merupakan salah satu cara untuk mengolah sebuah data menjadi variasi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat dalam menemukan solusi permasalahan. Merujuk pada Milles dan Huberman (1992), teknik analisis data terdiri dari beberapa tahap, diantaranya; pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Verifikasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuasa eksklusif dalam konteks pembangunan geothermal di Mataloko Ngada adalah kemampuan suatu pihak dalam mengendalikan akses dan pemanfaatan sumber daya geothermal. Pihak yang memegang kekuasaan ini seperti pemerintah dan perusahaan, dapat menentukan siapa yang boleh mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Ini sangat relevan karena pengelolaan sumber daya ini melibatkan pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi hak dan kepentingan masyarakat lokal. Misalnya masyarakat lokal memiliki hak atas tanah dan sumber daya tetapi kuasa eksklusif bisa membatasi akses mereka jika lahan tersebut dialokasikan untuk pembangunan geothermal tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai.

Adapun berbagai macam temuan yang penulis peroleh dalam hal ini terkait pengaturan, asar, pemaksaan serta regulasi yang mendukung klaim kuasa eksklusif yang terjadi dalam pembangunan geothermal di Mataloko, Ngada. Hasil penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dinamika kekuasaan yang terjadi serta interaksi antar berbagai macam kepentingan dalam dinamika kekuasaan yang terjadi dalam konteks pembangunan geothermal di Mataloko, Ngada. Analisis menggunakan kerangka teori eksklusif sosial Li (2011) dan teori 3 dimensi kuasa Gaventa (2006) memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini.

Regulasi Proyek Energi: Inisiatif Pemerintah Pusat dan Dukungan Pemerintah Daerah

Eksklusif kuasa pengaturan dalam pembangunan geothermal di Mataloko mengacu pada cara-cara dimana kelompok tertentu terutama masyarakat lokal atau adat dikecualikan dari proses pengambilan keputusan terkait pembangunan proyek. Eksklusif ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang biasanya mengarah pada marginalisasi masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Eksklusif hukum dan legalitas, secara hukum masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Eksklusif terjadi ketika hukum atau peraturan tidak diterapkan dengan adil. Proses perizinan dan konsultasi di Mataloko dikeluarkan dengan tanpa konsultasi yang memadai masyarakat lokal atau tanpa memperhatikan

kepemilikan tanah secara tradisional. Hal ini menciptakan jurang antara hak hukum formal dan hak tradisional masyarakat.

Pengaturan terkait pembangunan PLTPB Mataloko melibatkan sejumlah regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa pengaturan ini memiliki bias yang berkontribusi pada masalah eksklusi. Proyek pembangunan geothermal pada prinsipnya berasal dari dan didesain oleh pemerintah pusat melalui kementerian ESDM. Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah daerah kabupaten Ngada bertugas membantu pemerintah pusat untuk memuluskan pembebasan lahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Sejumlah data regulasi dan keputusan yang ditetapkan di atas baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ESDM, pemerintah provinsi NTT maupun pemerintah daerah kabupaten Ngada menjadi bukti legalitas regulasi negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi panas bumi di Flores khususnya di Ngada

Pasar Sebagai Wahan Eksklusi Sosial

Selain regulasi dan koersi, pasar juga merupakan salah satu instrumen kuasa eksklusi menurut Hall, Li dan Hirsch (2011). Di dalam pasar terdapat praktik jual- beli tanah dan sewa- menyewa. Dua bentuk pasar ini justru membuka jalan (pavetheway) bagi perpindahan kepemilikan tanah dari petani kepada perusahaan. Pemerintah dan perusahaan sebagai pihak pembeli, dan pemilik tanah sebagai pihak penjual.

Temuan penelitian mengungkapkan kenaikan harga tanah dalam 6 tahun sejak dimulainya proyek dan kenaikan harga tanah iSarulla ini dinilai relatif mahal kala itu. Masyarakat terpaksa menjual tanah mereka karena tekannya ekonomi.

Esklusi melalui pasar dalam pembangunan geothermal di mataloko menunjukkan bagaimana masyarakat lokal dapat terpinggirkan oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar dari diamika pasar. Masyarakat lokal tidak hanya kehilangan kendali atas tanah dan sumber daya alam tetapi juga kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari proyek tersebut, ketimpangan akses terhadap pasar, distribusi keuntungan, dan partisipasi dalam pasar kerja memperkuat marginalisasi mereka, sementara perusahaan besar mendominasi pengaturan.

Koersi Sebagai Siasat Eksklusi Sosial dalam Proyek Geothermal

Marx (2004) dalam Das Capital menegaskan bahwa tercabutnya massa rakyat dari basis produksi dipengaruhi oleh apa yang ia sebut sebagai akumulasi primitif. Prosesnya berawal dari pengusiran petani dari tanah, yang kemudian menyebabkan mereka keluar dari basis produksi dan terserap di pasar kerja. Lebih lanjut, proses akumulasi terus berlangsung pada era modern yang lebih canggih, yang Harvey (2003) sebut sebagai accumulation by dispossession. Akumulasi melalui perampasan bagi Harvey (2005) terjadi

melalui empat hal yakni privatisasi dan komodifikasi, finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, serta redistribusi tanah oleh negara.

Selama melakukan survei lahan pembangunan geothermal dan sosialisasi manfaat energi baru terbarukan pada 5 Januari 2021, pemerintah dan perusahaan melibatkan dua institusi keamanan yakni TNI dan kepolisian. Kehadiran aparat keamanan ini memberikan rasa tidak aman dan ketakutan bagi masyarakat di Mataloko. Label strategis yang disematkan kepada proyek panas bumi ini, tidak bisa dijadikan justifikasi untuk merampas tanah rakyat. Pelibatan pihak keamanan dalam setiap kunjungan atau dalam beberapa pertemuan, hal tersebut yang memicu ketakutan juga dari masyarakat.

Kehadiran aparat keamanan memang dapat menimbulkan kesan intimidatif bagi sebagian masyarakat, ketakutan masyarakat bisa terkait dengan kekhawatiran akan tereksklusikannya mereka yang berpotensi memarginalkan akses serta hak masyarakat.

Penggunaan kekerasan atau ancaman oleh pihak keamanan baik resmi ataupun tidak resmi untuk memaksa masyarakat menerima proyek geothermal hal ini memicu ketakutan dan trauma serta ketidakberdayaan masyarakat lokal. Adapula izin pembangunan tanpa melalui proyek konsultasi yang benar benar partisipatif dan inklusif dengan masyarakat lokal dampaknya masyarakat merasa terabaikan dan tidak memiliki kendali atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Adapun stigamatisasi kepada mereka yang menolak pembangunan sebagai anti kemajuan.

Legitimasi sebagai modus Kuasa Eksklusi

Menurut Hall, Li dan Hirsch (2011), aspek legitimasi merupakan bagian integral dari regulasi, koersi dan pasar. Dalam kasus pembangunan geothermal, aspek legitimasi sebetulnya sudah mulai dari kebijakan pemerintah pusat yang mengembangkan proyek geothermal di Indonesia umumnya dan di Flores khususnya. Regulasi pemerintah pusat mendapat dukungan regulasi pemerintah provinsi NTT dan pemerintah daerah kabupaten Ngada. Dengan ini, regulasi negara sebetulnya melegitimasi praktik pembangunan geothermal di Flores dan Ngada khususnya.

Legitimasi tersebut diperkuat dengan legitimasi pasar melalui praktik jual- beli tanah oleh perusahaan. Tanah yang telah dibeli itu menjadi milik perusahaan untuk dikembangkan proyek geothermal. Di titik ini terjadi peralihan kepemilikan dari petani sebagai pemilik tanah ulayat dan tanah milik pribadi bergeser menjadi tanah milik perusahaan. Legitimasi pasar disokong oleh legitimasi regulasi negara dalam hal kepemilikan tanah

Proyek geothermal seringkali didukung oleh peraturan pemerintah yang melegitimasi penguasaan lahan untuk kepentingan umum, namun dalam banyak kasus sslegelitas ini dipertanyakan masyarakat setempat yang merasa bahwa ak ahak adat mereka tidak dihormati.

Kuasa Tiga Dimensi John Gaventa

Pada skema pertama yakni kuasa terbuka dalam konteks geothermal di Mataloko Pemerintah Daerah,Perusahaan dan pejabat public memainkan peran dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan,izin eksplorasi dan kebijakan pembangunan. Proses ini terlihat transparan misalnya melalui konsultasi publik atau forum resmi lainnya tetapi seringkali hasil akhirnya mendukung kepentingan pemerintah sementara masyarakat lokal dikesampingkan. Masyarakat diundang dalam dikusi atau pertemuan terkait tetapi kuasa terbuka sering hanya menciptakan ilusi partisipasi.

Pada skema kedua yakni kuasa tertutup pada pembangunan geothermal di Mataloko. Kekuasaan terlihat dalam pembangunan di Mataloko menunjukkan adanya struktur formal yang mengatur proses pengambilan keputusan. Namun transparansi dan inklusifitas dalam proses ini perlu ditingkatkan untuk memastikan semua pihak terdampak dapat berpartisipasi secara bermakna.

Ketidakseimbangan kekuasaan juga berupa kekuasaan yang signifikan antara pengembang proyek,pemerintah dan masyarakat lokal,yang mampu menciptakan kondisi dimana masyarakat merasa terpaksa menerima proyek tanpa pilihan yang berarti.kurangnya informasi langsung terhadap masyarakat lokal sebagai bentuk paksaan yang langsung

Terakhir skema ke tiga kuasa terselubung,yang mana dalam pembangunan di Mataloko Dimataloko pihak yang berkuasa dalam hal ini pemerintah pusat menentukan isu apa yang dibahas dan apa yang diabaikan dalam diskusi public tentang poyek adalah juga keterbatasan akses masyarakat tentang informasi penting gerkait proyek serta penggfunaan elit lokal dalam hal ini kepala sa'o dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik.

Terkait control agenda isu isu penting seperti dampak dampak lingkungan dan sosial tidak mendapat perhatian yang cukup.kekuasaan ini berperan signifikan dalam mengontrol agenda dan pengambvilan keputusan terkait. Adanya ketidakseimbangan dalam akses dan pengaruh yang dimiliki olehb berbagai pemangku kepentingan dimana pemerintah memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lokal.

4. PENUTUP

Dalam konteks pembangunan Geothermal di Ngada, kolaborasi antara ke empat hal diatas turut mewarnai dinamika pembangunan. Penerapan kebijakan terkesan dipaksakan tanpa memerhatikan dampak yang terjadi akibat pembangunan. Seperti yang sudah penulis singgung di awal, pembangunan Geothermal telah dilakukan sejak tahun 1998. Namun dalam perkembangannya, ternyata banyak menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka menilai bahwa Pembangunan Geothermal tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap masyarakat. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pengeboran dan mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (Geothermal).

Dalam dimensi pertama kuasa terbuka keputusan mengenai pengembangan geothermal dibuat melalui mekanisme resmi seperti pendatangan MOU penetapa Flores sebagai pulau panas bumi dan lainnya. meskipun tampak transparan partisipasi masyarakat lokal bisa dibatasi oleh prosedur yang kurang inklusif atau akses informasi yang tidak memadai, pejabat pemerintah dan perusahaan memegang kendali dalam menetapkan kebijakan dan peraturan terkait sementara masyarakat lokal yang memiliki sedikit pengaruh atau kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Adalah juga kuasa tertutup yang mana dalam hal ini informasi tentang dampak lingkungan maupun sosial akibat proyek tidak disebar secara luas sehingga masyarakat lokal tidak memahami dampak sepenuhnya mengenai pembangunan terkait. Dan yang berikut tentang kekuasaan terselubung yakni narasi dominan yang mendorong proyek geothermal sebagai pembangunan dan kemajuan dapat mendominasi percakapan public mengabaikan pendapat masyarakat lokal menciptakan bahwa sebetulnya proyek tersebut adalah jalan satu satunya meskipun ada dampak negative, masyarakat lokal tidak berdaya karena norma sosial dan tekanan yang lebih berkuasa, ini menghalangi masyarakat untuk mengadvokasi hak hak mereka atau menuntut keterlibatan lebih besar dari proses pengambilan keputusan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aasland, A., & Flotten, T. (2000). Ethnicity and social exclusion in Estonia and Latvia. *Europe-Asia Studies*, 53(7).
- Agustha Ivanovic. (2014). Kekuasaan dan praktik keniskinan di pedesaan. *Halaman 30*.
- Albab Ulul Wildan. (2023). Kajian mengenai pembangunan geothermal di Flores berdasarkan perspektif teori keadilan. *Vol. 1, No. 4*, 286–302.
- Aldisyah. (2021). Kuasa eksklusi atas tanah di Kabupaten Gowa. *Halaman 3*.
- Arif Arifudin. (2010). Perspektif teori sosial Émile Durkheim dalam pendidikan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2).

- Borras, S. M., Edelman, M., March, C., & Kay, C. (2008). Transnational agrarian movements: Origins and politics, campaigns and impact. *Journal of Agrarian Change*, 169–204.
- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (1994). *Handbook of qualitative methodology*.
- Dhosa, D. D. (2019). Akuisisi tanah, eksklusi petani, dan advokasi resistensi warga pada kawasan industri Bolok di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 170.
- Giddens, A. (2006). *Sociologi* (5th ed.). Polity Press.
- Hadi, E. S., & Putra, E. V. (n.d.). Resistensi masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. *Vol. 2, No. 3*, 2622–1748.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Kuasa eksklusi* (pp. 5–280).
- Hall, E. H. (2011). The power of exclusion in agrarian conflict of Bangko Bangko National Natural Park of Lombok. *Jurnal*, 25(2).
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Igbal Taufik. (2019). Perspektif masyarakat terhadap pembangunan PLTP di Kecamatan Pauh Duo, Kab Solok Selatan. *Vol. 10, 2*.
- Inggridus, K. (2022). Eksklusi pembangunan geothermal di Flores. Kupang.
- Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi sosial politik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 117.
- Karunia, V. (2022). Eksklusi sosial: Pengertian dan contohnya. *Compas Com*.
- Lawang, R. M. Z. (2014). Beberapa hipotesis tentang eksklusi sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(II), 4–8.
- Lii. (2011). *The will to improve*. Amerika Serikat: Duke University Press.
- Luxemburg, R. (2003). *The accumulation of capital*. London and New York: Routledge.
- Marx, K. (2004). *Kapital I: Sebuah kritik ekonomi politik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UIP.
- Mudhoffir, A. M. (2022). *State of disorder: Privatised violence and the state in Indonesia*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Nugroho, A. (2023). Eksklusi sosial. *Compas Com*.

- Peluso, N. L., Affif, S., & Rachman. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia. *A Journal of Agrarian Change*, 377–407.
- Pierson, J. (2002). *Tackling social exclusion*. London and New York: Routledge.
- Pradoko, S. (2017). *Paradigma-paradigma kualitatif untuk penelitian seni, humaniora dan budaya*. Yogyakarta.
- Renita Abas. (2021). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3).
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutriani, W., & Wijayanto, B. (n.d.). Strategi pengembangan industri energi terbarukan geothermal di Kabupaten Pasaman. *Harmonisasi*.
- Sutrisno. (2016). Relasi kuasa dalam strategi pertanahan di Desa Prigelan. Yogyakarta: STPN Press.
- Taher, A. R., Gurnita, & Hollyati Subhi. (2019). Eksternalitas PT Pertamina Geothermal Energi terhadap kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup masyarakat (Studi kasus masyarakat Desa Muara Dua Kec. Ulubelu Kabupaten Tanggamus). *Repository lppm.unila.ac.id*.
- Ulul Wildan. (2023). Kajian terhadap pembangunan geothermal di Pulau Flores berdasarkan perspektif teori keadilan. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4).
- Wilson, I. D. (n.d.). *The politics of protection rackets in post-New Order Indonesia: Coercive capital, authority and street politics*. London and New York: Routledge.
- Yunita Desi. (2018). Eksklusi sosial pada masyarakat petani. *Vol. 2, No. 2*.
- Zakaria, A. D., Susilowati, & Fogar, I. (2020). Pengaturan pemanfaatan energi panas bumi pada hutan konservasi. *Jurnal Hukum*, 7.